

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 lewat deklarasi Bangkok. Tujuan utamanya berdirinya kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah dibentuknya organisasi regional di kawasan ASIA Tenggara untuk membangun kerjasama ekonomi di negara-negara Anggota ASEAN. Banyaknya perjanjian kerjasama ekonomi yang sudah diratifikasi banyak mempengaruhi hukum nasional Indonesia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi skema CEPT-AFTA dengan Intra ASEAN melalui keputusan Presiden No. 85 tahun 1995 dan selanjutnya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengadopsi kesepakatan ASEAN. Perubahan baru-baru ini PMK No.127/PMK.011/2008. Dan selanjutnya aturan tentang *Free trade Area* (FTA) dengan mitra-mitra ekonominya seperti negara China, Korea dan Jepang mengenai skema tarif juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

2. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ditingkatkan dengan pembentukan AFTA melalui skema CEPT sebagai mekanismenya, maka negara-negara anggota ASEAN diwajibkan untuk mereduksi tarif yang dikenakan terhadap produk-produk dari sesama negara ASEAN sampai nol persen dan maksimal lima persen.

3. Adanya kekuatan mengikat perjanjian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi terhadap hukum nasional Indonesia, Indonesia sudah meratifikasi

piagam ASEAN Oleh Undang-Undang No.38 tahun 2008 dan di implementasikan dalam Inpres No.5 tahun 2008 berisikan langkah strategis MEA.

Bidang jasa sendiri, negara Indonesia telah meratifikasi AFAS dan disahkan dengan peraturan presiden No.4 tahun 2004. Berbeda dengan investasi sendiri kalau dibidang jasa, kebijakan atau aturan tidak ada yang mengatur secara khusus. Di Investasi kita bisa melihat Perpres No.77 tahun 2007 tentang Daftar negatif Investasi. Daftar negatif Investasi menjadi kunci untuk melihat sejauh mana kendala implementasi di Indonesia.

Di bidang HKI, mengesahkan keputusan presiden No.89 tahun 1995. Walaupun demikian, hukum nasional Indonesia di bidang HKI, dirasa masih signifikan dengan bidang HKI di ASEAN.

Di bidang Industri skema AICO oleh keputusan presiden No.16 tahun 2006. Mengenai lebih lanjut diatur oleh keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.202/MPP/Kep/5/1999 mengenai tata cara Permohonan fasiitas.

Walaupun perjanjian tersebut dibuat sebegus mungkin tetap saja perjanjian tersebut masih banyak kendalanya, di negara Indonesia sendiri misalnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi pendidikan, Infrastruktur masih tergolong kurang memaadai dan Investasi asing yang seharusnya dimanfaatkan di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi nasional dihambat oleh rawutnya aturan-aturan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, Investasi asing menjadi terhambat. Dari segi pembangunan Infrastruktur juga masih terpusat di pulau Jawa saja, dan Indonesia Bagian Timur tergolong rendah.

## **B. Saran**

1. Dalam perkembangannya, dibentuknya ASEAN adalah antisipasi negara-negara Asia Tenggara akibat krisis ekonomi dan untuk menghindari berkembangnya paham komunisme yang berkembang di ASIA Tenggara. Di abad 21 liberalisasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara sudah begitu kompleksnya. Oleh sebab itu, di dirikannya ASEAN harus dipandang sebagai hal positif, tidak dipandang sebagai hal yang dapat merugikan negara kedepannya. Banyak perjanjian-perjanjian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang memiliki kekuatan mengikat bagi negaranya. Untuk itu, dalam membuat perjanjian-perjanjian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi harus lebih berhati-hati demi terlaksananya hukum yang dinamis dan tidak kontradiktif dengan hukum Nasional.

2. Mengingat Indonesia adalah pendiri ASEAN, seharusnya Indonesia harus menjadi panutan bagi negara-negara anggota ASEAN atau bahkan Dunia. kalau kita melirik sejarah, Indonesia sejak tahun 90 an dikenal sebagai Macan Asia. Untuk itu, Indonesia harus memanfaatkan liberalisasi ekonomi di ASEAN untuk menjadi *leading economic* dan siap bersaing dengan negara-negara tetangga. Serta membenahi infrastruktur, SDM dan perjanjian-perjanjian kerjasama ekonomi ASEAN yang lebih baik lagi.